

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada sistem demokrasi di Indonesia, ciri mendasar dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Meskipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi menjadi bagian yang sangat penting karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan politik atau mengenai sirkulasi elit secara baik dan tertib serta pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan, baik sebagai presiden dan wakil presiden, bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.¹

Pemilihan umum adalah salah satu proses dari sistem demokrasi dan sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya negara Indonesia. Dalam proses pemilihan umum, rakyat sangat berperan dalam menentukan siapa pilihannya yang layak mewakili parlemen serta struktur dari pemerintahan. Dimana sistem politik di Indonesia sepenuhnya menggunakan hak rakyat dalam pemilihan presiden dan kepala daerah.

Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat namun untuk memperjuangkan hak politik, sosial dan ekonomi. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat mempunyai wadah untuk menentukan pemimpinnya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan. Salah satu

¹Idil Akbar, *Pilkada Serentak dan Dinamika Politik, Pemerintahan Lokal Indonesia*. Jurnal Ilmu pemerintahan, (Universitas Padjadjaran : Vol 2 No 1, 2016), hlm. 95.

agenda yang paling penting dalam pemilihan adalah penyelenggaraan dari pemilu tersebut. Pada prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah apabila warga negara ikut aktif berpartisipasi pada proses politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi dari masyarakat dalam pemilu, maka pola kehidupan demokratis juga akan berjalan dengan baik.²

Pemilu yang di selenggarakan di daerah dikenal dengan istilah Pilkada. Pilkada di selenggarakan untuk memilih kepala daerah yang ada di daerah. Pilkada adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas penyerahan kekuasaan atau wewenang yang diberikan pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada merupakan wujud dari sistem pelaksanaan demokrasi. Dilaksanakannya pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya dilakukan oleh rakyat melalui pemilu³. Artinya penyelenggaraan pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan siapa kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada adalah sarana pemberian legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah. Dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga merupakan wujud nyata dari demokrasi serta menjadi sarana bagi rakyat dalam menentukan pilihannya. Dengan adanya pilkada

²Juri Saputra, *Analisis Perilaku Pemilih di Kelurahan Kedabang Kecamatan Sintang Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. Jurnal PEKAN, (STIKIP Persada Khatulistiwa Sintang : Vol 5 No 2, 2020), hlm 135.

³Kacung, *Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm, 37.

maka telah di laksanakan kedaulatan rakyat sebagai salah satu bentuk dari hak asasi politik masyarakat. Selain itu, dengan adanya pilkada dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah menjadi bagian dari demokrasi di indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka di tetapkan bahwa pemilihan kepala daerah di laksanakan secara langsung.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Frans Bapa Tokan pada tahun 2019 saat meneliti “Analisis Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017”. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa pilihan politik warga kota kupang terhadap dua pasangan walikota dan wakil walikota pada pilkada kota kupang tahun 2017 masih cenderung berkarakter sosiologis dan masih di pengaruhi oleh kesamaan latar belakang sosiologis antara pemilih dengan calon pemimpinnya. Dan pada penelitian ini juga menunjukkan kuatnya kultur sosial masyarakat yang terbentuk dari sentimen primordial agama, daerah dan suku lebih dominan daripada rasionalitas pemilih dalam memilih calon pemimpinnya.⁵

Penelitian juga dilakukan oleh Rasidi pada tahun 2020 saat meneliti “Analisis Perilaku Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus : Kemenangan H. Muhammad Amru-Said Sani)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di kabupaten Gayo Lues terhadap

⁴Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 huruf r.

⁵Frans Bapa Tokan, Analisis *Perilaku Memilih Pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan : Vol 4 No 1, 2019). Diakses pada tanggal 9 Juni 2021, Pukul 17.00.

kemenangan H. Muhammad Amru-Said Sani di pengaruhi oleh beberapa pendekatan sosiologis dan juga pendekatan pemilih rasional. Dari ketiga pendekatan tersebut, masyarakat memilih karena adanya ikatan emosional dan kedekatan dengan pasangan calon, masyarakat juga memilih karena ada kaitannya dengan tempat tinggal, pekerjaan dan agama.⁶

Perilaku pemilih masyarakat merupakan aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu dan perilaku pemilih yang dimaksud disini adalah pelaksanaan kampanye, kepartaian serta proses votting atau pemberian suara. Keterlibatan masyarakat Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Walikota tahun 2020 juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin untuk lima tahun mendatang.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya di selenggarakan di Indonesia, pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada bulan desember tahun 2020. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota termasuk Kota Sungai Penuh.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, yang menarik pada pilwako Sungai Penuh terdapat dua pasangan calon yang maju sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh. Dan yang paling menarik

⁶Rasidi, *Analisis Perilaku Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Kemenangan H. Muhammad Amru-Said Sani)*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2020).

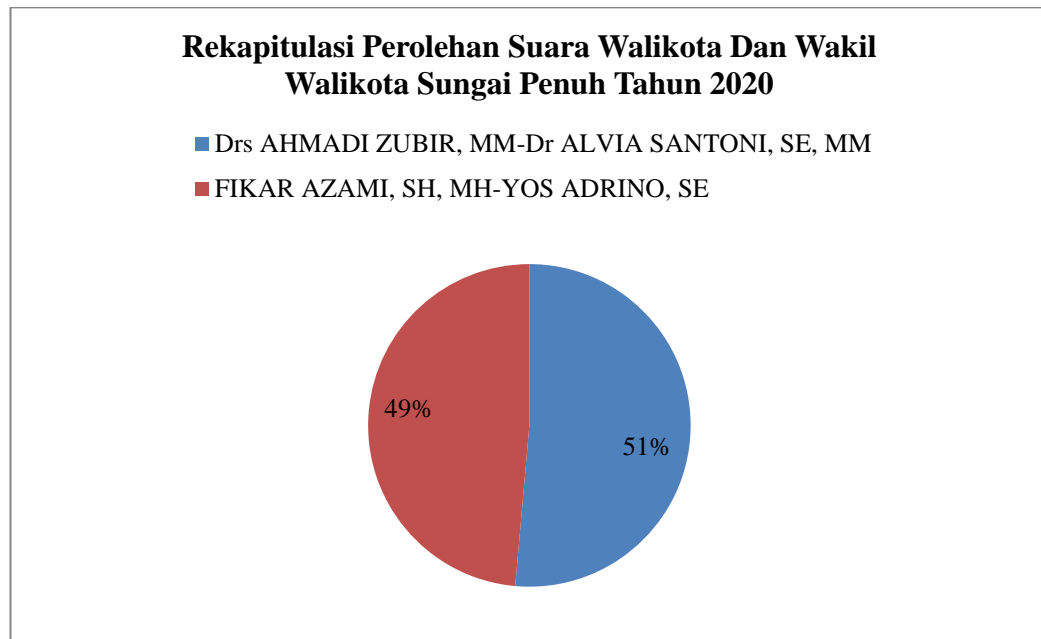
ditunggu karena menampilkan pertarungan hebat dari kandidat mantan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang sekaligus merupakan anak dari walikota petahana Asafri Jaya Bakri serta kandidat yang berasal dari akademisi. Pemilihan walikota Sungai Penuh Tahun 2020 menjadi pemilihan walikota ketiga di Kota Sungai Penuh setelah pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2010 dan Pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2015.

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh no urut 1 yaitu Ahmadi Zubir-Alvia Santoni yang merupakan pasangan yang berasal dari akademisi dua perguruan tinggi yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI-Perjuangan dan Partai Berkarya dengan jumlah 5 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh, sementara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota no urut 2 yaitu Fikar Azami-Yos Adrino yang diusung oleh 8 partai koalisi yaitu Partai Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah 20 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh.

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh bulan desember tahun 2020, pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni mendapatkan perolehan suara lebih banyak dan unggul dari pasangan Fikar Azami-Yos Adrino yang merupakan anak petahana dari Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dengan perolehan suara Ahmadi Zubir-Alvia Santoni 51,4% dan anak petahana Walikota Asafri Jaya Bakri yang berpasangan dengan Yos Adrino mendapat perolehan suara 48,6%.

Gambar 1.1

**Rekapitulasi Perolehan Suara Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh
Tahun 2020**



Sumber : KPU Kota Sungai Penuh

Gambar 1.2

**Data Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai
Penuh Tahun 2020**

Wilayah	Drs Ahmadi Zubir, MM- Dr Alvia Santoni, SE, MM	Fikar Azami, SH, MH- Yos Adrino, SE
Sungai Penuh	2.497	2.666
Pesisir Bukit	5.680	1.939
Hampanan Rawang	5.229	4.526
Tanah Kampung	1.280	5.207
Kumun Debai	2.220	4.155
Pondok Tinggi	5.754	3.858
Koto Baru	3.336	1.665
Sungai Bungkal	2.838	3.121
Jumlah	28.834	27.140

Sumber : KPU Kota Sungai Penuh

Uniknya berdasarkan gambar, pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni unggul dalam perolehan suara dibandingkan dengan Fikar Azami-Yos Adrino. Ahmadi Zubir-Alvia Santoni memperoleh 28.834 suara (51,44%) sementara Fikar Azami-Yos Adrino memperoleh 27.140 suara (48,56%), dengan selisih perolehan suara 1.613 suara dari jumlah DPT 68.097 yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 57.334 sedangkan sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 10.763. Pilkada serentak 9 desember lalu juga meruntuhkan politik dinasti di Kota Sungai Penuh, padahal Fikar Azami yang berpasangan dengan Yos Adrino merupakan anak petahana dari Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri, fenomena yang tidak biasa ini sangat diluar dugaan karena seharusnya pasangan dari calon dinasti politik mempunyai banyak kekuatan untuk menang pada pemilihan kepala daerah baik dari segi finansial, kekuasaan, basis massa dan tim pemenangan yang sudah berpengalaman, namun semuanya kalah dengan pendatang baru yang berlatar belakang dari Akademisi Pimpinan perguruan tinggi.

Ahmadi Zubir yang berhasil meruntuhkan politik dinasti keluarga Asafri Jaya Bakri yang berlatar belakang birokrat (PNS), berpasangan dengan akademisi muda Dr Alvia Santoni, SE, MM. Ahmadi akhirnya bisa mengalahkan putra Asafri Jaya Bakri, Fikar Azami yang berupaya mempertahankan dinasti politik keluarganya di Kota Sungai Penuh. Runtuhnya politik dinasti pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mulai

dari tingginya pendidikan politik masyarakat serta adanya kesadaran dari masyarakat yang menginginkan perubahan untuk Kota Sungai Penuh.

Perilaku politik seseorang dalam menyikapi pilkada ini bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ikut serta dalam partai politik juga merupakan bentuk dari perilaku politik. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk negara.

Perilaku pemilih dalam pilwako juga sangat penting, dikarenakan apabila pelaksanaan pilwako itu berjalan dengan sukses, maka tentu saja perilaku pemilih itu juga sukses. Perilaku politik dan partisipasi politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku politik pemilih merupakan aspek yang menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Hal yang ingin di tekankan ialah bagaimana perilaku politik pemilih dalam pelaksanaan kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian juga proses votting ataupun pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dalam pertarungan perebutan suara ini partai politik seperti memasarkan sebuah produk barang ataupun jasa kepada pasar targetnya.

Pada dasarnya, jika diibaratkan dengan berdagang, target pasar untuk partai politik adalah para pemilih (Voters), jika kita melakukan klarifikasi pemilih yang menjadi target pasar partai politik yang dapat dianalisis dengan pendekatan Sosiologi, Psikologis dan Rasional.

Seiring dengan berkembangnya pemilihan umum di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat juga berkembang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi

apa yang menjadi pilihan masyarakat itu sendiri. Partisipasi politik masyarakat sendiri bisa saja mempengaruhi apa yang menjadi pilihan individu atau masyarakat itu sendiri serta latar belakang dari pemilih juga mempengaruhi pendekatan-pendekatan yang ada pada pemilih, namun pendekatan terhadap pemilih juga dipengaruhi oleh media dan sosialisasi politik.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku pemilih masyarakat Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

pemilih masyarakat bagi pembaca terutama dalam konsep perilaku pemilih pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pengetahuan bagi ilmu-ilmu sosial dan masyarakat khususnya tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana perilaku pemilih yang ada di Kota Sungai Penuh.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Teori Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Dinyatakan sebagai pemilih apabila terdaftar sebagai pemilih oleh pendata petugas pemilih.

Ramlan Surbakti mendefinisikan perilaku pemilih sebagai aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum untuk memilih kandidat tertentu. Berdasarkan pendapat diatas, perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan proses pemilihan umum, karena berkaitan dengan sikap memilih atau tidak memilih seseorang. Adapun jenis perilaku pemilih yang dimaksud yaitu meliputi kegiatan pemilih saat proses kampanye, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam partai politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara atau dalam konteks indonesia disebut pemilihan umum.

Perilaku pemilih dapat di tunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum secara langsung, pemberian suara atau voting secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses seseorang anggota dalam suatu kelompok yang menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan diantara anggota kelompok sebagai seorang pejabat maupun pengambil keputusan.

Perilaku juga menyangkut sikap manusia yang akan bertindak untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila sikap seseorang terhadap sesuatu dapat memperhatikan perilakunya. Perilaku tertentu kadang-kadang sengaja di tampilkan untuk menyembunyikan sikap yang sebenarnya.

Studi mengenai pemilihan umum dalam kajian ilmu politik dikenal dengan konsep perilaku pemilih (*Votting Behaviour*), perilaku pemilih terbentuk oleh suatu proses sosialisasi politik, sedangkan keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Perilaku pemilih secara sederhana dapat dimaknai sebagai tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai. Perilaku pemilih dapat di kaitkan dengan adanya proses pemilihan umum di suatu negara atau daerah tertentu.

Salah satu bentuk dari perilaku politik adalah perilaku memilih yang dilihat dalam proses pemilihan umum, perilaku ini merupakan sikap dari individu untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu. Perilaku individu dalam pemilu erat kaitannya dengan perilaku pemilih, khususnya ketertarikan individu dalam menentukan partai politik atau kandidat politik yang mereka sukai dan dirasa

paling cocok yang akan mereka pilih untuk masa mendatang untuk memimpin daerahnya.

Banyaknya informasi dan pesan politik menjelang kampanye menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisis informasi yang telah di dapatkan. Disamping itu, informasi yang di dapatkan sering bertolak belakang dengan kenyataan yang ada sebenarnya, hal itu juga di akibatkan dari manipulasi politik untuk menyudutkan lawan politik, janji-janji politik juga menyebabkan pemilih lebih berfikir dalam menentukan pilihannya.

Menurut Harold d. Laswell yang dikutip oleh S.P Varma yang memberikan catatan penting tentang perilaku politik yaitu yang *Pertama*, perilaku politik yang berorientasi pada nilai yang berusaha mencapai tujuan yang dibentuk dalam proses perilaku politik. *Kedua*, perilaku politik yang bertujuan untuk menjangkau masa depan yang bersifat mengantisipasi yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Dari kedua catatan penting tersebut, perilaku politik memiliki dimensi perilaku yang menunjukkan adanya keterkaitan perilaku politik dengan latar belakang politik yang sebelumnya.⁷

Perilaku politik merupakan suatu kegiatan dari aktivitas yang berkaitan dengan proses politik dalam pembuatan keputusan politik dan pelaksanaan aktivitas politik. Ada dua variabel yang dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam berpartisipasi politik yaitu kepercayaan dan keyakinan pada unsur politik yang menyatu pada faktor status sosial, status ekonomi, pengalaman organisasi dan situasi politik serta kesadaran politik.

⁷Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Utama, 2012), hlm. 87.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam kajian perilaku pemilih dikenal juga dengan istilah mazhab columbia yang mulai muncul sekitar tahun 1940an. Pendekatan ini secara sederhana dapat di pahami sebagai pendekatan yang melihat suatu kegiatan individu atau kelompok yang memiliki kaitannya dengan konteks sosial.

Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan konteks sosial. Dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas pendapatan dan agama. Pendekatan juga di gambarkan melalui kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan untuk partai tertentu. Pengelompokan ini juga berdasarkan gender, organisasi formal dan informal. Pendekatan sosiologis juga mengasumsikan bahwa karakteristik dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.

Pendekatan sosiologi secara logis terbagi atas dua model penjelasan mikrososiologis dan makrososiologis yang dikembangkan oleh ilmuwan politik dan dari Universitas Columbia, pendekatan ini juga dikenal dengan Mazhab Columbia. Sedangkan penjelasan model makrososiologis menelaah tentang perilaku pemilih di seluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologi ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dalam memilih seseorang. Di dalam pendekatan

sosiologi ini, seseorang memilih karena norma yang berlaku di masyarakat, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan memberikan suara sepenuhnya dalam pemilihan umum.

Menurut Bone dan Ranney dalam firmanzah, setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi pendapat yang berbeda terhadap beberapa faktor berikut yaitu :

- a. Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan ibu dibandingkan kaum lak-laki karena dalam kultur indonesia umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan laki-laki.
- b. Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dalam mempertahankan kemerdekaan lebih dirasakan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.
- c. Peran-peran sosial, misalnya masih ada anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, sehingga pola pilihan politik di tentukan oleh para suami dan istri mengikuti pilihan suami.⁸

Pendekatan sosiologis ini memilih sebenarnya bukan sepenuhnya pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang

⁸Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta : Yayasan Bintang Obor, 2012).

cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik yang biasanya menunjuk tiga faktor dalam pendekatan ini yaitu status sosial ekonomi, agama dan daerah tempat tinggal.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mazhab Michigan Efriza. The Surver Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang. Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey Universitas Michigan sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok michigan.⁹

Pendekatan psikologis yang menggunakan identifikasi partai sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti rasa ketertarikan individu terhadap partai, sekalipun ia bukan anggota. Munculnya pendekatan psikologis merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap beberapa ilmuan politik terhadap pendekatan psikologis. Beberapa ilmuan penganut pendekatan psikologis menganggap pendekatan psikologis secara metodologis sulit dilaksanakan, terutama dalam aspek pengukurannya.

⁹Adman Nursal, *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPRD, DPD, Presiden*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 59-60.

Dalam pendekatan psikologis, perilaku pemilih di tentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (*Voters*) sebagai produk dari proses sosialisasi. Sikap seseorang disini sebagai refleksi dari kepribadian seseorang yang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik.¹⁰ Identifikasi seseorang terhadap partai juga akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap partai tertentu para calon dan isu-isu politik yang berkembang.

Konsep pendekatan psikologis pada perilaku pemilih digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih pada pemilihan umum yang berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk kepada persepsi pemilih atau partai-partai politik atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Konkritnya, partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

Di dalam pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai proses produk dari sosialisasi yang menjelaskan bahwa sikap seseorang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Ada beberapa faktor psikologis yang mendorong pemilih menentukan pilihannya yaitu identifikasi partai orientasi kandidat dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengatur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi

¹⁰Khrishno Hadi J, K, *Perilaku Partai Politik Studi Kasus Perilaku Partai Politik Dalam Kampanye. Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, (Malang : UMM Pres, 2006).

politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi atau orientasi politik sering di wariskan oleh orang tua, namun dapat pula di pengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan dan situasi kerja.

Pendekatan psikologis sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan *Votting Behaviour* pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

Proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang di beritakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi kelompok Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik yang berkembang dari para calon, bukan latar belakang sosial atau budayanya.

Penganut pendekatan psikologis ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi merupakan kajian utama yang merupakan kedekatan emosional pada satu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat di pengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Beberapa indikator yang dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang ingin mencalonkan diri kembali dengan melihat kualitas, kompetensi dan integrasi kandidat.

3. Pendekatan Rasional

Pada pendekatan rasional, isu-isu politik menjadi pertimbangan penting para pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang di ajukan.

Pendekatan rasional juga melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang di pertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang ingin mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung rugi digunakan untuk keputusan partai yang dipilih, terutama keputusan untuk ikut memilih atau tidak. Dan Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup.¹¹

1.5.2 Perilaku Politik

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya dengan manusia lain dan menjadi ciri khas individu dengan individu yang lainnya. Dalam konteks politik, perilaku di kategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok dengan individu di masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik yang pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik merupakan suatu kegiatan dari proses pembuatan pelaksanaan keputusan politik serta yang melakukan kegiatan adalah pemerintah

¹¹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 145-146.

masyarakat. Perilaku politik adalah tindakan seseorang atau kelompok dalam proses kegiatan politik. Perilaku politik meliputi tindakan dan tanggapan internal seperti sikap, persepsi, orientasi dan keyakinan serta tindakan nyata seperti pemberian suara. Seorang individu dan kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya untuk melakukan perilaku politik.¹²

Secara sederhana, perilaku politik dapat di pandang sebagai sebuah pikiran dan tindakan seseorang yang berkaitan dengan proses politik. Menurut Sastroatmojo mendefinisikan perilaku politik secara lebih rinci yakni sebagai berikut :

Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena disamping perilaku politik masih ada perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut yakni tujuan masyarakat secara umum.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, meskipun pada dasarnya perilaku politik merupakan bagian dari perilaku secara umum, akan tetapi perilaku politik tentunya berbeda dengan perilaku lainnya seperti dalam konteks ekonomi, keagamaan, budaya dan bentuk perilaku lainnya. Karena pada dasarnya perilaku politik selain terkait dengan urusan kekuasaan yang mana dapat memiliki otoritas tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan masyarakat secara umum.

¹²Amirotin Sholikhah, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Artikel dalam Jurnal Komunika : Vol 8 No , 2016), hlm. 85.

¹³Sastroatmojo, Sudijono, *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 2-3.

Secara menyeluruh dapat di pahami bahwa perilaku politik adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan politik yang di lakukan oleh individu atau kelompok. Seseorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan proses perilaku politik.

Perilaku politik juga berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat serta kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang memungkinkan adanya suatu otoritas yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat berupa perilaku politik yang berupa perilaku ekonomi, agama, keluarga dan budaya¹⁴.

Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivitas politik individu yang ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga negara. Perilaku politik juga berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Perilaku politik juga meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes dan lobi. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap politik merupakan

¹⁴Raoda Nur dkk, *Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2014 Di Desa Kenaungan Kecamatan Lubakkang Kabupaten Pangkep*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan : Vol 5 No 1, 2016), hlm. 93.

hubungan antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Sikap dan perilaku masyarakat di pengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah :

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
- b. Berhak dan memiliki wewenang untuk mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas dan lembaga swadaya masyarakat.
- c. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai perilaku politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar.

Dari hasil pendekatan di atas, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu dan aktor politik yaitu :

1. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

4. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika melakukan kegiatan.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku pemilih juga sama dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu.

Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik, yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik dibagi dua menjadi perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik dan perilaku politik warga negara biasa yang tidak berwenang tetapi dapat mempengaruhi pihak pembuat keputusan politik (Partisipasi politik).

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya di tentukan oleh fungsi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan. Sikap dan perilaku masyarakat di pengaruhi oleh kejadian pada masa lalu dan hal yang selalu di ingat, kejadian politik secara umum maupun yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pimpinan atau calon wakil rakyat yang tidak pernah di tepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Bentuk-bentuk perilaku politik merupakan hal yang dilihat untuk menilai bagaimana masyarakat menunjukkan keikutsertaannya di dalam pemilihan umum yaitu diantaranya ikut dalam proses kampanye, memberikan hak suaranya atau menunjukkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum Presiden, anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan ikut mengawasi penentuan pemenang dalam pemilihan umum.

1. Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh pasangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasanya juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan wakil terpilih.

2. Memberikan hak suara

Memberikan hak suara dalam pemilihan umum adalah pokok dari partisipasi politik warga negara. Dalam pemberian suara ini akan membuktikan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum, apakah keikutsertaan masyarakat akan besar atau kecil dalam memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara tempat tinggalnya. Pemberian hak suara dari pemilih ini yang seharusnya menjadi acuan agar besarnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan yaitu melakukan sosialisasi tentang wajibnya ikut serta dalam pemilu. Pendekatan ini menggunakan

bentuk dari jiwa atau sikap untuk menjelaskan perilaku seseorang agar tumbuh dalam dirinya.

3. Mengawasi penentuan pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam aktivitas politik karena Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Setelah berpartisipasi pada pemilihan umum, masyarakat berhak untuk mengawasi keputusan hasil dari pemilu tersebut. Adapun peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan.

Ada dua variabel yang mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam berpartisipasi politik yaitu kesadaran dan kepercayaan kepada unsur politik yang ada. Variabel tersebut menyatu dalam faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Kesadaran adalah sadar akan perbuatan, kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri manusia sesuai dengan yang ia yakini. Refleksi adalah ungkapan kesadaran, dimana ia dapat memberikan atau bertahan pada situasi dan kondisi tertentu dalam sebuah lingkungan.

Kesadaran disini menjelaskan bahwa seorang aktor politik sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan politik guna memenuhi haknya. Usaha calon

kandidat untuk meraih kemenangan dan menjadi pemimpin harus disertai dukungan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kunci utama setiap kandidat untuk bisa meraih kekuasaan dalam pemerintahan, kepercayaan merupakan kunci dalam kompetisi kepemimpinan, kepercayaan merupakan amanah dari masyarakat yang terbentuk karena status dan orientasi politik yang dimiliki oleh para calon kandidat. Misalnya status sosial yang dimiliki oleh salah satu calon kandidat karena status kebangsawannya sehingga masyarakat percaya dengan kemampuannya.

1.5.3 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam demokrasi, keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maka masyarakat berhak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan politik. Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting didalam demokrasi, dimana masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik mulai dari pemilihan sampai kampanye.

Menurut Mac Closky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang dilihat yaitu tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah.¹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Dan masyarakat yang ingin ikut serta aktif dalam bidang politik dalam pemilihan umum.

¹⁵Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2008).

Selain itu tinggi atau rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dan rezim yang sedang berkuasa.

Partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif adalah kegiatan yang mempengaruhi proses input politik yaitu kegiatan mengajukan usul mengenai kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Partisipasi pasif

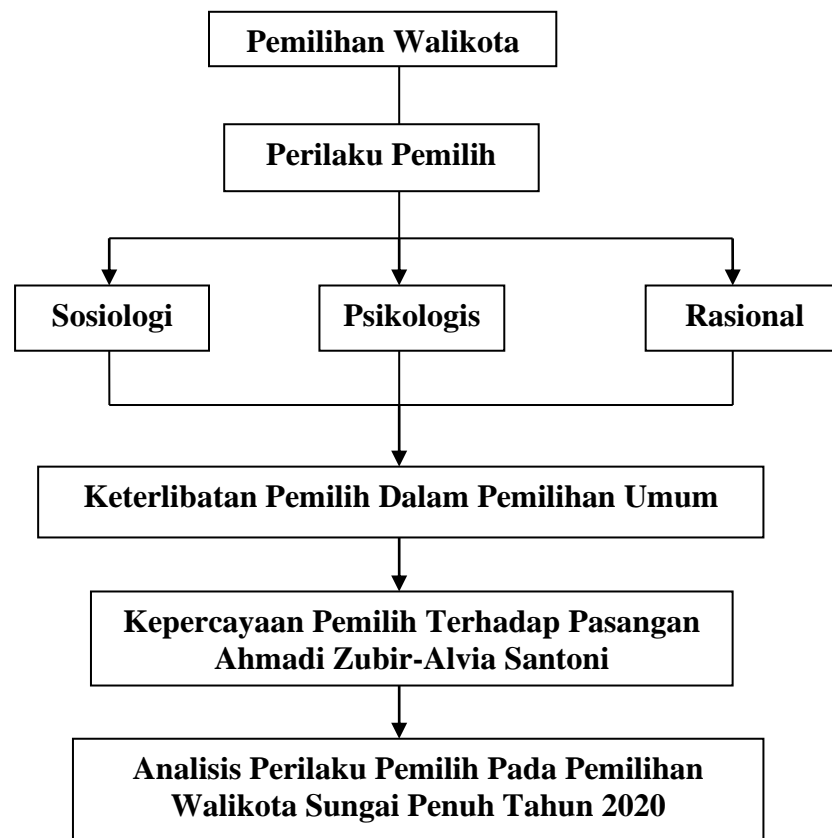
Partisipasi pasif adalah kegiatan atau tindakan yang menaati pemerintah, menerima serta melaksanakan peraturan pemerintah. Partisipasi politik pasif ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses input politik.¹⁶

Partisipasi politik sangat mempengaruhi jumlah suara dari setiap calon kepala daerah yang ada, hal ini juga merupakan faktor berhasil atau tidaknya pilkada disuatu daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pilkada juga akan semakin tinggi.

¹⁶Elly M Setiadi, Usnan Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Kencana Pena Media Group, 2013).

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena perilaku pemilih pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020.



Pada pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, perilaku pemilih pada masyarakat juga memiliki pengaruh yang cukup kuat dan terdapat partisipasi politik. Melalui pemilihan Walikota Sungai Penuh akan dilihat dan dianalisis perilaku pemilih menggunakan 3 tipe pendekatan perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti yaitu pendekatan sosiologi, psikologis dan rasional.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang secara langsung berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi tertentu dengan menggunakan strategi dalam mencari makna, pemahaman, pengertian maupun kejadian kehidupan manusia secara teliti, kontekstual dan menyeluruh yang bersifat naratif.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perilaku pemilih masyarakat pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 karena penelitian ini mendeskripsikan tentang adanya sebab akibat, pemikiran, persepsi dan aktivitas sosial.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Karena pasangan walikota Ahmadi Zubir-Alvia Santoni mampu memenangkan dan memperoleh suara lebih unggul daripada pasangan Fikar Azami-Yos Adrino yang merupakan anak dari walikota Petahana Asafri Jaya Bakri.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana perilaku pemilih masyarakat Kota Sungai Penuh pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di 8 kecamatan yaitu Sungai Penuh,

¹⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 329.

Pesisir Bukit, Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Kumun Debai, Pondok Tinggi, Koto Baru dan Sungai Bungkal.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari suatu sumber untuk menyusun pendapat, pengertian dan analisis. Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang di peroleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian¹⁸. Data primer harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang telah ada¹⁹. Sumber data sekunder adalah catatan oleh media, situs Web, data statistik dan internet.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagai makna, tujuan dan kegunaan. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam

¹⁸*Ibid*, hlm. 350.

¹⁹*Ibid*, hlm. 359.

penelitian (narasumber). Informan juga merupakan orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan orang yang menjadi informan ini menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian.

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan peneliti adalah orang yang tahu dan memiliki ketertarikan maupun kepedulian terhadap perkembangan perpolitikan di Kota Sungai Penuh.

Tabel 1.2 informan penelitian

No	Informan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Ir Irwan	Laki-Laki	Ketua KPU Kota Sungai Penuh
2.	Heri Harmaini	Laki-Laki	Kader Partai PDIP Kota Sungai Penuh
3.	Linda Mainita	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
4.	Joka Sarjaya	Laki-Laki	Pedagang
5.	Watini	Perempuan	Pedagang
6.	Ahmad Ansori	Laki-Laki	Petani
7.	Nety Wulan Sari	Perempuan	Mahasiswi
8.	Titin Nopianti	Perempuan	Guru Honorer
9.	Andriono	Laki-Laki	Satpam Bank BRI
10.	Desi Ratna Sari	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
11,	Sarmen	Laki-Laki	Anggota KPPS
12.	Safrudin	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat Kota Sungai Penuh
13.	Khairil Afdal	Laki-Laki	Mahasiswa
14.	Tiara Noveria	Perempuan	Honorer
15.	Reza Safitri	Perempuan	Honorer
16.	Sonia Afrizela	Perempuan	Guru Honorer
17.	Randi Kurnia	Laki-Laki	Mahasiswa
18.	Sariono	Laki-Laki	Wiraswasta
19.	Yesmi Elvia	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
20.	Eka Putri Irvoni	Perempuan	Pedagang
21.	Hendra	Laki-Laki	Kurir Balilanjjo

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian yang dapat mempermudah penelitian yaitu :

1. Metode interview atau Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara secara langsung. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi secara tulisan maupun direkam secara tidak terstruktur dimana jenis wawancara ini memberi peluang peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan.

Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal yang berkaitan dengan individu yang akan di wawancara. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memahami jawaban yang telah di dapatkan dari informan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data terakhir untuk mendukung dan memperkuat data yang dilakukan selama penelitian tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto.²⁰

3. Penyusuran data online

²⁰*Ibid*, hlm 391.

Penyusunan data online dikumpulkan melalui online seperti media online, internet dan lainnya yang menyediakan informasi secara online sehingga peneliti dapat menggunakan dan memanfaatkan informasi baik berupa data secara cepat yang dapat di pertanggung jawabkan secara akademik.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data yang menjadi informasi saat melakukan penelitian, analisis data juga di perlukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data (penyajian) dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak menumpuk dan tidak mempersulit analisis data selanjutnya serta data yang akan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Kesimpulan yang di kemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisir, mudah dibaca dan di pahami. Dalam penyajian data tidak mendeskripsikan secara naratif, namun disertai dengan proses analisis sampai proses penarikan kesimpulan.²¹

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari dan memahami arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses kegiatan analisis data dan tahap akhir dari proses pengolahan data.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dari interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pengertian dari triangulasi sumber dan triangulasi metode yaitu :

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendidikan Kuantitatif R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 341.

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data merupakan pengumpulan data dengan menggunakan metode dan sumber dari perolehan data. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.²²

²²*Ibid*, hlm. 350.